



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 15 JANUARI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

KILAS DEWAN

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Ingatkan SPPG Jaga Kualitas dan Kebersihan

Sidoarjo, Bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, M. Kayan, mengingatkan kepada pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Desa Temu Kecamatan Prambon, agar senantiasa menjaga kualitas dan kebersihan produk makanan yang dihasilkan.

Kayan juga mengatakan semua pihak harus ikut mengingatkan agar SPPG di Kabupaten Sidoarjo menjaga kualitas dan kebersihan produk makanan yang diolah.

"Karena yang mengkonsumsi anak-anak kita, yang menjadi aset bangsa," komentar M. Kayan, Selasa (13/1) kemarin, mendampingi Wabup Mimik Idayana, yang meluncurkan SPPG di desa Temu Kecamatan Prambon.

Wabup Mimik Idayana dalam kesempatan itu juga minta warga sekitar ikut aktif dalam pengawasan kualitas produk kuliner yang dihasilkan SPPG.

"Sebab kita khawatirnya kalau tidak diawasi, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan massal. Tentu akan merugikan kita semua. Ya pengelola, ya daerah, ya anak-anak sekolah yang mengkonsumsinya," ujarnya disela-sela meresmikan dan keliling memantau tempat operasional SPPG Desa Temu itu. [kus.dre]

Halte Baru Dilengkapi Ruang Tunggu Berkaca

Dukung Operasional
Trans Jatim

SIDOARJO - Halte bus Alun-Alun Sidoarjo segera difungsikan bersamaan dengan dilukainya kembali kawasan alun-alun. Halte tersebut tetap melayani Trans Jatim dengan fasilitas yang kini lebih rapi dan nyaman. Beberapa fasilitas baru disiapkan seperti area tunggu yang beratap dan tertutup kaca, bangku

penumpang yang lebih nyaman, serta jalur naik-turun yang lebih tertata. Sekretaris Dinas Perhubungan (Disub) Sidoarjo Dwiwijaya Mandisuma memastikan tidak ada perubahan fungsi pada halte tersebut. Penambahan hanya menambah sisi bangunan dan kelayakan layanan bagi penumpang. "Fungsinya masih sama dengan yang dulu," katanya, Rabu (14/1). Bangunan halte tersebut dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan (DLHK) Sidoarjo sebagai bagian dari penataan kawasan alun-alun. Pengoperasian ini menandai pembukaan resmi alun-alun. Diklub berharap fasilitas baru tersebut bisa mendukung pergerakan warga di pusat kota. Dengan halte yang lebih nyaman dan tertata, layanan transportasi umum di kawasan Alun-Alun diharapkan akan lebih optimal. (fal/hen)



BAHAS ASUSILA: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori (kiri) memimpin rapat terkait kasus pelecehan seksual di Tulangan kemarin (14/1).

Setahun, 358 Anak Jadi Korban Kekerasan

SIDOARJO - Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) menyusul adanya kekerasan seksual terhadap anak SD di Desa Medaleh, Kecamatan Tulangan. Selain membahas masalah tersebut, legislatif dan eksekutif juga membahas tingginya korban kekerasan di kalangan anak-anak.

Kekerasan terhadap anak di Sidoarjo cenderung meningkat. Pada 2024, tercatat ada 253 kasus kekerasan pada anak-anak. Jumlahnya naik menjadi 358 kasus

tahun lalu. "Meningkatnya korban korban dan keluarga saat ini sudah mulai berani speak up dan melapor," kata Kepala DP3AKB Sidoarjo Heni Kristiani. Dia mengatakan jika seluruh korban kasus tulan-an sudah diidentifikasi. Ada tiga balita dan dua remaja. Heni menambahkan, para korban merupakan kakak beradik yang menjadi sasaran sejak 2020. Anak-anak itu kerap diajak dan dibujuk pelaku sebelum mengalami kekerasan.

Satgas Pencegahan Belum Optimal, Kabid Mutu Pendidikan Dispendikbud Sidoarjo Lisa

Bupati Ajak ASN Bayar Pajak Lebih Awal

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengampun gerakan "ASN Sadar Pajak" dengan mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk membayar pajak daerah lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/1/26).

Bupati Subandi menegaskan bahwa pembangunan daerah sangat bergantung pada kemandirian fiskal. Menurutnya, pajak daerah menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk taat membayar pajak daerah, khususnya ASN yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas dengan membayar pajak lebih awal.

"Tahun 2026 ini saya mengajak seluruh ASN di Sidoarjo untuk menjadi garda terdepan

dan contoh bagi masyarakat dalam membayar pajak lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo," ujar Bupati Subandi.

Bupati berharap, kepatuhan ASN dalam membayar pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat mencerminkan integritas serta wujud nyata pengabdian ASN dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.

"ASN Sidoarjo yang taat pajak akan menjadi panutan bagi masyarakat demi terwujudnya pembangunan Sidoarjo yang lebih baik," katanya.

Selain itu, Bupati Subandi menambahkan bahwa pembayaran pajak daerah saat ini semakin mudah seiring penerapan digitalisasi layanan. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak karena pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui perangkat gawai.

"Ayo bayar pajak sekarang. Bisa menggunakan QRIS atau Virtual Account agar lebih cepat, mudah, dan transparan," ajaknya. • Loe



Pamflet (banner) imbauan ajakan bayar pajak lebih awal

RUMAH AMBRUK

Dikira Suara Biawak, Ternyata Tembok Retak

SIDOARJO - Januar, warga Desa Gelam, Candi, sempat mendengar bunyi krek-krek. Namun, dia mengira itu suara biawak. Januar baru tahu jika itu ternyata suara tembok rumahnya yang retak dan akhirnya rumah miliknya ambruk.

Ambruknya rumah Januar terjadi pada Selasa (13/1) malam sekitar pukul 22.00. Saat itu, Januar, istri, dan kedua anaknya sedang tidur di dalam rumah. Beruntung, mereka masih sempat menyelamatkan diri.

"Awalnya terdengar bunyi krek-krek dan saya kira biawak. Tiba-tiba dinding samping ambruk, lalu bagian atas ikut runtuh," kata Januar. Dia menjelaskan jika tidak ada hujan deras apalagi angin kencang saat kejadian.

Kades Gelam M. Muslich mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan asesmen kondisi rumah tersebut dan akan mengusulkan bantuan perbaikan ke Pemkab. "Kami coba cek dulu kondisinya," ujarnya. (eza/hen)



BUTUH PERHATIAN: Januar mengumpulkan sisa-sisa barang berharga di rumahnya yang ambruk Selasa (13/1) malam.



Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing.

SPKT MMPP Polresta Sidoarjo Dapat Penghargaan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Polresta Sidoarjo dapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas inovasi dan perbaikan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mal Mini Pelayanan Polri (MMPP). SPKT MMPP masuk sebagai finalis top inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025 untuk kategori umum.

Penghargaan diberikan Menteri PANRB Rini Widayanti. Apresiasi ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah tahun 2025.

Polresta Sidoarjo Dapat Apresiasi Kategori Optimalisasi SPKT-Pamapta di Apel Kasatwil. Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Menteri PANRB untuk Polresta Sidoarjo. (md/rus)

Dinas Perhubungan Terapkan Sistem QRIS untuk Parkir di Alun-alun

SIDOARJO (RM) - Menggelorakan kembali Alun-alun Sidoarjo pasca revitalisasi, Dinas Perhubungan (Disub) Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan sistem QRIS, sehingga bisa parkir akan masuk langsung ke kas Perakab, namun tentu saja dengan kartu yang akan dipasangkannya," ujar Budi Basuki. Kantor Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo ini menjelaskan, komposisi pendapatan parkir di Alun-alun yaitu 60 persen untuk Pemkab dan 40 persen untuk pengelola.

Ia menjelaskan, parkir kendaraan roda dua dan roda empat akan dipisahkan sesuai zona yang telah ditentukan. Selain itu, Disub juga akan menerbitkan naskah serta marka parkir agar pengunjung mudah memahami area yang diperbolehkan untuk parkir. Parkir akan dikelola sesuai aturan. Pengunjung kami imbau

untuk mematuhi rambu dan aturan parkir di lapangan demi kenyamanan bersama," tegasnya. Budi menegaskan, tarif parkir di kompleks Alun-alun Rp 3 ribu untuk sepeda motor dan Rp 5 ribu untuk mobil. "Penggunaan akan kami perketat. Jika ditemukan parkir sembarangan yang mengganggu lalu lintas, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan. Ada dua ruas yang nantinya bebas parkir, yaitu sisi Timur depan museum Iyadudu dan depan Masjid Agung. Sedangkan sisi Utara, saat ada kegiatan di pendapa, parkir akan dikelola pegawai kami tanpa dipungut biaya," tuturnya.

Dengan penataan ini, Disub berharap Alun-alun Sidoarjo dapat menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan lalu lintas. (tudi)



SIDAK. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki saat sedang ke area Alun-alun Sidoarjo terkait rencana revitalisasi.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

Bupati Ajak ASN Bayar Pajak Lebih Awal

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengampunyeakan gerakan “ASN Sadar Pajak” dengan mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk membayar pajak daerah lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/1/26).

Bupati Subandi menegaskan bahwa pembangunan daerah sangat bergantung pada kemandirian fiskal. Menurutnya, pajak daerah menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk taat membayar pajak daerah, khususnya ASN yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas dengan membayar pajak lebih awal.

“Tahun 2026 ini saya mengajak seluruh ASN di Sidoarjo untuk menjadi garda terdepan

dan contoh bagi masyarakat dalam membayar pajak lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo,” ujar Bupati Subandi.

Bupati berharap, kepatuhan ASN dalam membayar pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dapat mencerminkan integritas serta wujud nyata pengabdian ASN dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.

“ASN Sidoarjo yang taat pajak akan menjadi panutan bagi masyarakat demi terwujudnya pembangunan Sidoarjo yang lebih baik,” katanya.

Selain itu, Bupati Subandi menambahkan bahwa pembayaran pajak daerah saat ini semakin mudah seiring penerapan digitalisasi layanan. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak karena pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui perangkat gawai.

“Ayo bayar pajak sekarang. Bisa menggunakan QRIS atau Virtual Account agar lebih cepat, mudah, dan transparan,” ajaknya. ● **Loe**



Pamphlet (banner) imbauan ajakan bayar pajak lebih awal

ASN Kota Delta Diimbau Sadar Pajak

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo kampanyekan gerakan ASN Sadar Pajak. Seluruh ASN diimbau untuk membayar pajak lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran.

Bupati Subandi mengatakan, pembangunan Sidoarjo sangat bergantung pada kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, pajak daerah merupakan instrumen kunci kemandirian fiskal daerah dalam membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik.

Oleh karenanya, warga Sidoarjo diharapkan taat membayar pajak daerah. Terutama seluruh ASN Sidoarjo sebagai contoh bagi warga. "Tahun 2026 ini saya mengajak seluruh ASN di Sidoarjo untuk menjadi garda terdepan dan contoh bagi masyarakat Sidoarjo dalam membayar pajak lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo," ajak Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/1).

Bupati berharap ASN dapat

menunjukkan integritasnya dengan membayar pajak daerah. Khususnya pembayaran PBB-P2 lebih awal. Menurutnya hal itu menjadi wujud nyata bakti ASN Sidoarjo dalam membangun. "ASN Sidoarjo taat pajak adalah panutan rakyat Sidoarjo untuk pembangunan Sidoarjo yang lebih baik," ujarnya.

Bupati juga mengatakan membayar pajak saat ini sangat mudah. Digitalisasi pembayaran pajak daerah sudah diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga warga tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak untuk melakukan pembayaran dan dapat menggunakan *handphone*. "Ayo bayar pajak sekarang, bisa pakai QRIS atau *virtual account* agar lebih cepat dan transparan," imbaunya. (sud/kri/san/epe)

The poster features two officials in white uniforms: H. Subandi, S.H., M.Kn., Bupati Sidoarjo, and Hj. Mimik Idayana, Wakil Bupati Sidoarjo. They are standing in front of a backdrop that includes the logo of the Kabupaten Sidoarjo BPPD (Badan Pengelola Pajak Daerah) and the slogan #DisidoarjoAja. The main text on the poster reads "GASP Gerakan ASN Sadar Pajak" and "ASN Sidoarjo : Taat Pajak, Panutan Rakyat, Sidoarjo Lebih Baik!". At the bottom, there are contact details: a WhatsApp number 082121206168, a website link pajakdaerah.sidoarjakab.go.id, and an Instagram handle @bppd.sidoarjo.

ASN Diminta Bayar Pajak Lebih Awal sebagai Contoh Masyarakat

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi menggaungkan Gerakan ASN Sadar Pajak (GASP). Melalui gerakan ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau menjadi garda terdepan dalam membayar pajak daerah lebih awal tanpa menunggu jatuh tempo.

Kampanye tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi saat berada di Pendapa Delta Wibawa, Rabu (14/1). Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh tingkat kemandirian fiskal, yang salah satu penopangnya adalah pajak daerah.

"Pembangunan Sidoarjo sangat bergantung pada kemandirian fiskal dae-



EFEKTIF: Pelayanan pembayaran pajak daerah di kantor BPPD Sidoarjo.

rah. Pajak daerah adalah instrumen kunci untuk membangun infrastruk-

tur, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik," tegas Subandi.

Menurutnya, kepatuhan membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi

juga cerminan integritas. Karena itu, ASN diharapkan tidak sekadar patuh, melainkan menjadi contoh nyata bagi masyarakat.

"Tahun 2026 ini saya mengajak seluruh ASN Sidoarjo menjadi teladan. Bayar pajak lebih awal, jangan menunggu jatuh tempo. ASN harus menjadi panutan masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lebih dini sebagai wujud bakti ASN dalam membangun daerah.

"ASN Sidoarjo yang taat pajak adalah bukti integritas sekaligus bentuk pengabdian nyata untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo," katanya.

● Ke Halaman 10

✓ Dinas Perhubungan Terapkan Sistem QRIS untuk Parkir di Alun-alun

SIDOARJO (BM) - Menjelang dibukanya kembali Alun-alun Sidoarjo pasca revitalisasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo mulai menata sistem parkir di kawasan tersebut.

Penataan ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan pengunjung sekaligus mencegah kemacetan di sekitar pusat kota, termasuk penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema parkir yang lebih tertib dengan penempatan titik parkir resmi dengan melibatkan pengelola resmi yang ditunjuk Dinas Perhubungan.

"Kami tidak ingin kawasan Alun-alun menjadi semrawut akibat parkir liar. Oleh karena itu, kami

siapkan kantong-kantong parkir yang jelas dan petugas yang berjaga. Ke depan, parkir di Alun-alun Sidoarjo akan menggunakan sistem QRIS, sehingga bea parkir akan masuk langsung ke kas Pemkab, namun tentu saja segera kami siapkan penerapannya," ujar Budi Basuki.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo ini menjelaskan, komposisi pendapatan parkir di Alun-alun yaitu 60 persen untuk Pemkab dan 40 persen untuk pengelola.

Ia menjelaskan, parkir kendaraan roda dua dan roda empat akan dipisahkan sesuai zona yang telah ditentukan. Selain itu, Dishub juga akan menempatkan rambu serta marka parkir agar pengunjung mudah memahami area yang diperbolehkan untuk parkir. "Parkir akan dikelola sesuai aturan. Pengunjung kami imbau

untuk mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan demi kenyamanan bersama," tegasnya.

Budi menegaskan, tarif parkir di kompleks Alun-alun Rp 3 ribu untuk sepeda motor dan Rp 5 ribu untuk mobil. "Pengawasan akan kami perketat. Jika ditemukan parkir sembarangan yang mengganggu lalu lintas, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan. Ada dua ruas yang nantinya bebas parkir, yaitu sisi Timur depan monumen Jayandaru dan depan Masjid Agung. Sedangkan sisi Utara, saat ada kegiatan di pendapa, parkir akan dikelola pegawai kami tanpa dipungut biaya," tutupnya.

Dengan penataan ini, Dishub berharap Alun-alun Sidoarjo dapat menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan lalu lintas. (udi)



SIDAK: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki saat sidak ke areal Alun-alun Sidoarjo terkait rencana penataan parkir.

Operasi Katarak Gratis Kado Harjasda

SIDOARJO, SURYA - Ratusan warga mengikuti skrining kesehatan mata di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/1), untuk mendapatkan layanan operasi katarak gratis. Program ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Sidoarjo (Harjasda) ke-167.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi RSI Siti Hajar Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Warga yang dinyatakan mengalami katarak setelah pemeriksaan akan menjalani operasi secara cuma-cuma.

"Ini kegiatan tahunan yang kami gelar. Alhamdulillah, di tahun ketiga pelaksanaannya antusiasme masyarakat tetap tinggi," ujar Wakil Direktur RSI Siti Hajar, Riza Ahmadi Thohir, di sela kegiatan.



SURYA / M. TAUFIK

KADO HARJASDA - Ratusan warga saat mengikuti skrining Kesehatan untuk mendapatkan program operasi katarak gratis di Pendopo Sidoarjo dalam rangkaian Harjasda ke-167, Rabu (14/2).

Selain skrining katarak, layanan kesehatan yang disediakan meliputi pemeriksaan gula darah acak (GDA) dan pengecekan tekanan darah. Menurut Riza, layanan ini bertujuan sebagai langkah awal deteksi dini penyakit, terutama diabe-

tes, hipertensi, dan gangguan kesehatan mata.

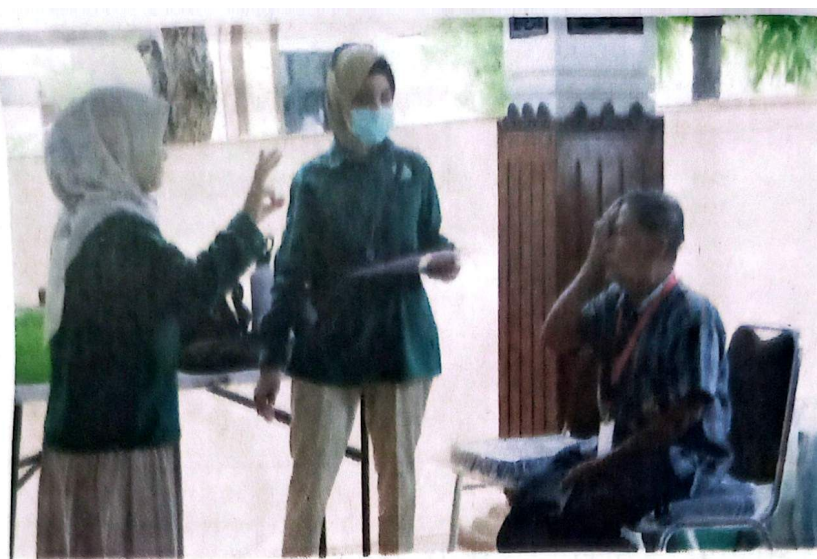
"Layanan ini terbuka untuk seluruh masyarakat sebagai upaya deteksi dini sekaligus edukasi kesehatan," katanya.

Seluruh pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis profesio-

nal dari RSI Siti Hajar. Peserta juga mendapatkan penjelasan singkat mengenai kondisi kesehatannya serta anjuran tindak lanjut jika ditemukan indikasi medis tertentu.

Ratusan warga rela mengantri demi mendapatkan layanan tersebut. "Saya mengalami gangguan penglihatan. Sekarang diperiksa, dan kalau memang katarak katanya bisa dapat operasi gratis," ujar salah satu warga peserta skrining.

Wakil Ketua Baznas Sidoarjo, Ilhamuddin, menyebut program ini sebagai bentuk kepedulian nyata bagi warga dhuafa. "Sebanyak 105 warga telah terdaftar dan menjalani skrining mata. Jika memenuhi syarat, operasi katarak akan dilakukan di RSI Siti Hajar. Semuanya gratis," tegasnya. (ufi)



BERMANFAAT: Salah satu peserta screening mata oleh Baznas Sidoarjo.

BAZNAS Sidoarjo Gelar Operasi Katarak Gratis bagi Warga Duafa

SIDOARJO-Pendapa Delta Wibawa Rabu (14/1) pagi tampak berbeda. Di bawah naungan bangunan bersejarah tersebut, harapan baru sedang dirajut. Menyongsong Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi kemanusiaan berupa screening dan operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu, Rabu (14/1).

Program yang bersinergi dengan Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini bukan sekadar rutinitas seremoni. Ini adalah kado nyata bagi masyarakat dhuafa agar dapat kembali melihat dunia dengan jernih. Sebanyak 105 warga yang

telah terdaftar kini menjalani screening mata, proses cek kesehatan mata secara intensif di Pendopo delta wibawa ini, dan nantinya bila memenuhi syarat untuk Tindakan medis berupa operasi katarak akan dilakukan di RS Siti Hajar.

Wakil Ketua BAZNAS Sidoarjo, Drs. H. Ilhamuddin, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BAZNAS dalam memastikan kesehatan sebagai hak dasar seluruh warga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

"Dalam rangka Harjasda ke-167, BAZNAS melakukan operasi katarak gratis yang

● Ke Halaman 10

BAZNAS Sidoarjo Hadirkan Operasi Katarak Gratis bagi Warga Dhuafa

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pendopo Delta Wibawa pagi itu berbeda. Di bawah naungan bangunan bersejarah tersebut, harapan baru sedang dirajut. Menyongsong Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi kemanusiaan berupa screening dan operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu, Rabu (14/1/2026).

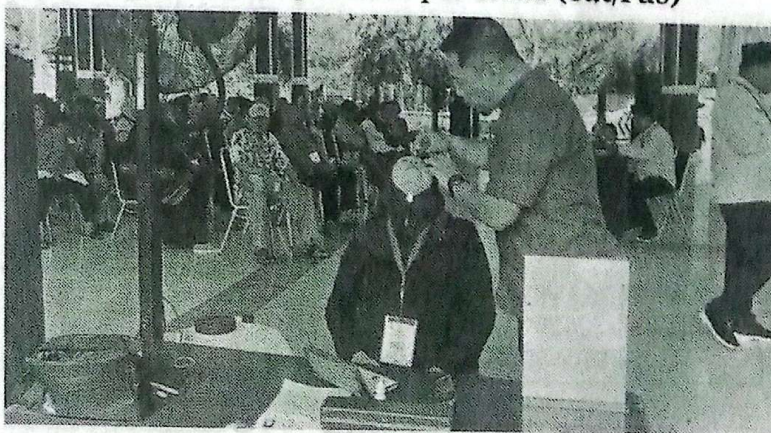
Program yang bersinergi dengan Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini bukan sekadar rutinitas seremoni. Ini adalah kado nyata bagi masyarakat dhuafa agar dapat kembali melihat dunia dengan jernih. Sebanyak 105 warga yang telah terdaftar kini menjalani screening mata, proses cek kesehatan mata secara intensif di Pendopo delta wibawa ini, dan nantinya bila memenuhi syarat untuk Tindakan medis berupa operasi katarak akan dilakukan di RS Siti Hajar.

Wakil Ketua BAZNAS Sidoarjo, Drs. H. Ilhamuddin, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BAZNAS dalam memastikan kesehatan sebagai hak dasar seluruh warga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Dalam rangka Harjasda ke-167, BAZNAS melakukan operasi katarak gratis yang menargetkan ratusan warga dhuafa di Kabupaten Sidoarjo. Kami ingin mengembalikan penglihatan mereka agar dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Ilhamuddin di sela-sela kegiatan.

Tak berhenti pada kesehatan mata, BAZNAS Sidoarjo juga telah menyiapkan rangkaian bakti sosial lainnya. Pada 20 Januari 2026 mendatang, perhelatan khitanan massal akan digelar dengan titik lokasi di Pendopo Delta Wibawa dan RS Sidoarjo Barat.

Target program ini menyasar 300 anak dari keluarga kurang mampu. Tak hanya layanan medis, BAZNAS juga memanjakan para peserta dengan “tali asih” lengkap berupa paket baju koko, sarung, songkok, tas sekolah, hingga uang saku sebesar Rp250.000 per anak. (cat/rus)



Operasi katarak gratis yang digelar BAZNAS Sidoarjo, kemarin.

Anggota Polsek Taman Bantu Warga Tergeletak Tanpa Identitas



Sidoarjo,
Memorandum

Anggota Polsek Taman Polresta Sidoarjo menunjukkan respons cepat dan sigap dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat (dumas) terkait ditemukannya seorang warga yang tergeletak dan tidak memiliki identitas di wilayah hukumnya, Selasa (13/1).

Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Taman Aiptu Choirul Wahyudi segera mendatangi lokasi kejadian guna memastikan kondisi serta melakukan langkah-langkah penanganan awal. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang warga dalam kondisi tergeletak dan tidak ditemukan identitas diri yang melekat pada korban.

"Sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, personel Polsek Taman langsung melakukan koordinasi dengan Satpol PP un-



Aiptu Choirul Wahyudi membantu warga di lokasi kejadian.

tuk bersama-sama melakukan penanganan lebih lanjut," ujar Aiptu Choirul Wahyudi.

Petugas kemudian mengevakuasi warga tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis.

Selama proses penanganan dan evakuasi, personel Polsek

Taman memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman dan kondusif, serta mengimbau warga sekitar agar tetap tenang dan tidak berkerumun. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta memperlancar proses evakuasi.

Polsek Taman juga melaku-

kan pendataan awal dan berupaya mencari informasi terkait identitas warga yang bersangkutan dengan menggali keterangan dari masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan guna memastikan penanganan yang tepat serta memudahkan proses koordinasi dengan pihak terkait. (san/day)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

KAMIS, 15 JANUARI 2026



PELAYANAN: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meresmikan gedung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Temu, Kecamatan Prambon.

Wabup Resmikan SPPG MBG, Ingatkan Kualitas dan Kebersihan Makanan

PRAMBON-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meresmikan gedung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Selasa (13/1/2026).

Dapur ini akan melayani kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat, khususnya murid sekolah.

Mimik mengajak warga sekitar untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan aktif dalam pengawasan sehari-hari.

Menurutnya, keamanan dan kualitas

makanan tidak bisa hanya dibebankan kepada pengelola dapur. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari memastikan dapur selalu steril, peralatan memasak bersih, hingga menu yang disajikan benar-benar higienis dan layak konsumsi.

"Pengawasan bersama menjadi sangat penting, apalagi belakangan ini banyak beredar informasi di media sosial tentang dugaan keracunan massal di beberapa daerah. Kita tentu tidak ingin hal seperti itu terjadi di Sidoarjo," kata Mimik.

● Ke Halaman 10

Wabup Resmikan Dapur SPPG MBG di Prambon, Jaga Pengawasan Kualitas Bersama

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, meresmikan gedung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Selasa (13/1/2026).

Dapur ini akan melayani kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat, khususnya murid sekolah. Dalam sambutannya, Mimik Idayana mengajak warga sekitar untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan aktif dalam pengawasan sehari-hari.

Menurutnya, keamanan dan kualitas makanan tidak bisa hanya dibebankan kepada pengelola dapur. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari memastikan dapur selalu steril, peralatan memasak bersih, hingga menu yang disajikan benar-benar higienis dan layak konsumsi.

"Pengawasan bersama menjadi sangat penting, apalagi belakangan ini banyak beredar informasi di media sosial tentang dugaan keracunan massal di beberapa daerah. Kita tentu tidak ingin hal seperti itu terjadi di Sidoarjo," kata Mimik Idayana.

Ia berharap dapur SPPG Desa Temu dapat menjadi contoh penerapan standar kebersihan dan keamanan pan-

gan bagi dapur-dapur MBG lainnya di Sidoarjo, baik dari sisi pengelolaan maupun disiplin kerja petugas dapur.

Selain itu, Mimik Idayana menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang dirancang untuk jangka panjang. Oleh karena itu, ia meminta yayasannya pengelola, sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk lebih aktif menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Masih ada yang beranggapan program ini akan diganti dengan bantuan uang tunai. Sampai hari ini, hal itu tidak benar. Program yang berjalan tetap Makan Bergizi Gratis dan akan terus dilak-

sanakan," tegasnya.

Ia juga mengakui masih ada sebagian pihak yang ragu mendukung pendirian dapur MBG di lingkungannya. Untuk itu, ia mengajak kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan warga sekitar untuk bersama-sama mengawal program ini demi masa depan gizi anak-anak Sidoarjo.

Koordinator SPPG 001 Prambon, Wahyu Sejati, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi kunci hingga dapur SPPG Desa Temu dapat beroperasi. Ia berharap dapur ini mampu memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anak-anak penerima manfaat, tetapi juga bagi

lingkungan sekitar.

"Dapur ini kami siapkan agar benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik. Kami berterima kasih atas pendampingan dan dukungan, khususnya dari Ibu Wakil Bupati, sejak awal pembangunan hingga hari ini," ujarnya.

Menurut Wahyu, keberadaan dapur SPPG juga membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pemanfaatan produk lokal sebagai bahan baku makanan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Kayan. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan

kebijakan strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. "Di Kecamatan Prambon sendiri sudah ada tiga dapur SPPG. Dapur Desa Temu ini layak menjadi rujukan, asalkan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan benar-benar dijaga," ujarnya.

Kayan menekankan peran sentral pengelola dapur dan yayasannya dalam menjaga kualitas layanan dan disiplin kebersihan. "Anak-anak kita adalah aset bangsa. Program ini akan berhasil jika semua pihak mau saling mengingatkan dan bekerja bersama," pungkasnya. (Khol/Dy)



BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Perkuat Ekosistem Desa Perlindungan Pekerja Konstruksi

Sidoarjo, Bhirawa

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Raya terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Ekosistem Desa yang digelar di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (14/1), dengan fokus utama pada pekerja di sektor jasa konstruksi desa.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, di antaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD), serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rapat koordinasi ini, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari monitoring cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat desa, evaluasi pembayaran manfaat program, hingga sos-



BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Raya terus memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa.

ialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2025.

Regulasi ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan desa.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda, Teldi Rusnal menegaskan, desa memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap para pekerjanya.

“Pembangunan desa tidak hanya berbicara tentang fisik infras-

truktur, tetapi juga tentang perlindungan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Melalui Permendes Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah desa memiliki landasan yang kuat untuk memastikan pekerja jasa konstruksi desa terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Teldi.

Teldi menambahkan, sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perangkat desa menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan kepesertaan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. [geh.fen]

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Ingatkan SPPG Jaga Kualitas dan Kebersihan

Sidoarjo, Bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, M.Kayan, mengingatkan kepada pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Desa Temu Kecamatan Prambon, agar senantiasa menjaga kualitas dan kebersihan produk makanan yang dihasilkan.

Kayan juga mengatakan semua pihak harus ikut mengingatkan agar SPPG di Kabupaten Sidoarjo menjaga kualitas dan kebersihan produk makanan yang diolah.

“Karena yang mengkonsumsi anak-anak kita, yang menjadi aset bangsa,” komentar M.Kayan, Selasa (13/1) kemarin, mendampingi Wabup Mimik Idayana, yang melaunching SPPG di desa Temu Kecamatan Prambon.

Wabup Mimik Idayana dalam kesempatan itu juga minta warga sekitar ikut aktif dalam pengawasan kualitas produk kuliner yang dihasilkan SPPG.

“Sebab kita khawatirnya kalau tidak diawasi, jangan sampai terjadi kasus keracunan makanan massal. Tentu akan merugikan kita semua. Ya pengelola, ya daerah, ya anak-anak sekolah yang mengkonsumsinya,” ujarnya disela-sela meresmikan dan keliling memantau tempat operasional SPPG Desa Temu itu. [kus.dre]



Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing.

SPKT MMPP Polresta Sidoarjo Dapat Penghargaan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Polresta Sidoarjo dapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas inovasi dan perbaikan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mal Mini Pelayanan Polri (MMPP). SPKT MMPP masuk sebagai finalis top inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025 untuk kategori umum.

Penghargaan diberikan Menteri PANRB Rini Widyantini. Apresiasi ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah tahun 2025.

Polresta Sidoarjo Dapat Apresiasi Kategori Optimalisasi SPKT-Pamapta di Apel Kasatwil

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Menteri PANRB untuk Polresta Sidoarjo. (md/rus)



Tinggal sisi utara, kalau ruas sisi selatan sudah rampung sampai Jalan Raya Wadungasri."

Muhammad Makhdum
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo

Betonisasi Brigjen Katamso Ditargetkan Tuntas Februari

Sisakan Sisi Utara Sepanjang 700 Meter

SIDOARJO - Proyek betonisasi di Jalan Brigjen Katamso, Waru dikeluhkan pengendara karena lamanya pengerjaan. Pembangunan seringkali menyebabkan kemacetan. Pemkab menargetkan proyek yang seharusnya tuntas Desember 2025 bisa selesai Februari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Muhammad Makhdum meng-



MASIH SEPARUH: Jalan Brigjen Katamso sisi utara belum selesai dibeton. Sementara sisi selatan sudah sampai Jalan Raya Wadungasri.

ungkapkan, hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 67 persen. "Kami pastikan, pekerjaan terus di-

kebut oleh kontraktor pelaksana," katanya kemarin (14/1). Menurutnya, pekerjaan rigid atau betonisasi masih meny-

BETONISASI BRIGJEN KATAMSO

- Ditarget tuntas Feburari
- Pembangunan mencapai 67 persen
- Sisakan sisi utara 700 meter
- Proyek jalan diikuti pembangunan saluran



Sumber: DPUBMSDA Sidoarjo

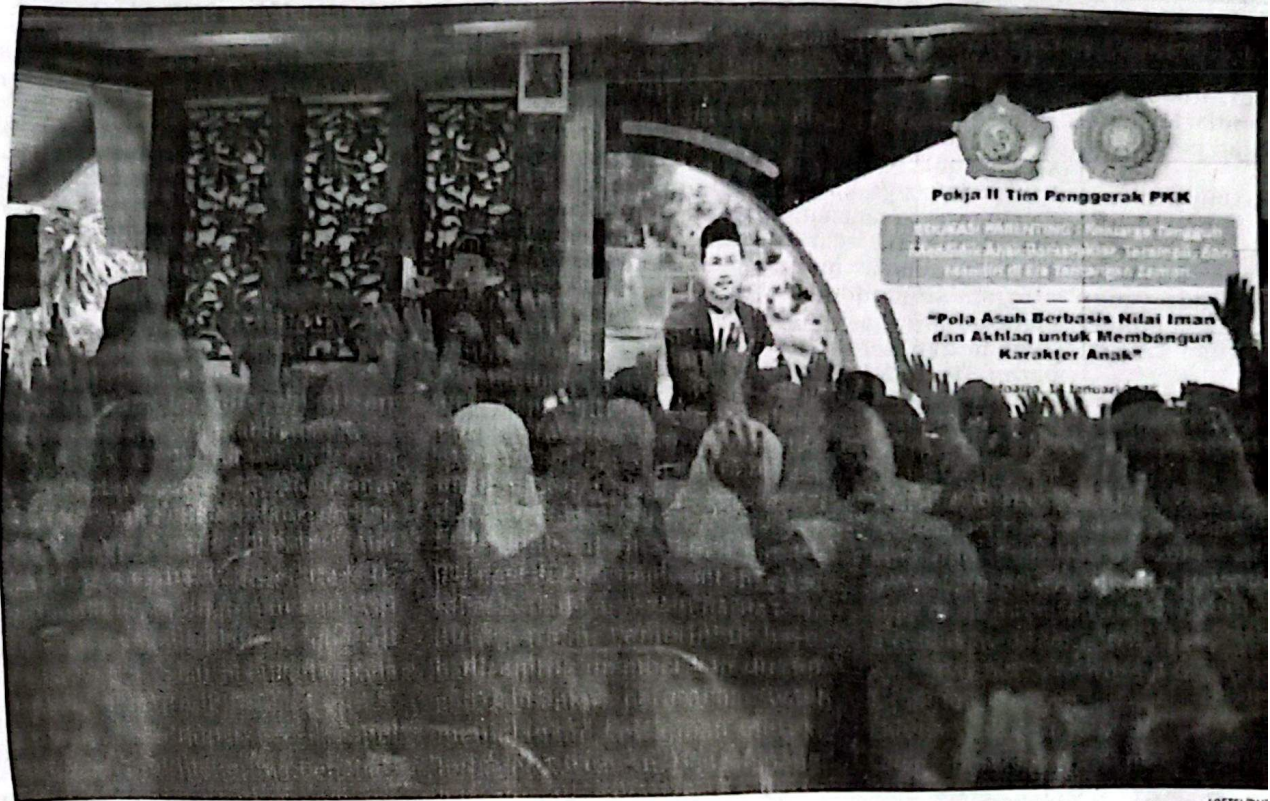
sakan satu sisi jalan yakni sisi utara sepanjang kurang dari 700 meter. "Tinggal sisi utara, kalau ruas sisi selatan sudah rampung sampai Jalan Raya Wadungasri," tambah Makhdum. Total panjang Jalan Brigjen Katamso yang dibetonisasi saat ini yaitu mencapai sekitar 850 meter

Drainase Tinggal Perapian
Selain betonisasi badan jalan, pekerjaan bahu jalan juga masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan untuk pemasangan saluran drainase

di sepanjang ruas tersebut telah selesai dan saat ini tinggal tahap finishing. "Pengerjaan bahu jalan juga sedang dikerjakan. Drainase sudah terpasang dan tinggal perapian," kata Makhdum.

Kontraktor Pelaksana Ramadhan mengatakan, jalan bisa dibuka maksimal akhir bulan ini. Dia berharap kondisi cuaca bisa mendukung percepatan pengerjaan. "Kami terus kebut, maksimal akhir bulan ini bisa segera dibuka kembali jalannya," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



LOETFI/DUT

Edukasi parenting yang digelar TP PKK Kabupaten Sidoarjo melalui Pokja II di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (13/1/26).

Ketua TP PKK ajak Ibu Ciptakan Keluarga Tangguh di Era Digital

SIDOARJO - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi, mengajak para ibu untuk berperan aktif menciptakan keluarga tangguh sebagai benteng utama dalam mendidik anak di tengah tantangan era digital dan globalisasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan edukasi parenting yang digelar TP PKK Kabupaten Sidoarjo melalui Pokja II di Pendopo Delta Wibawa, Selasa sore (13/1/26).

Kegiatan parenting yang mengusung tema “Keluarga Tangguh Mendidik Anak Berkarakter, Terampil, dan Mandiri di Era Tantangan Zaman” ini diikuti perwakilan PKK kecamatan dan desa se-Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Fatayat, Muslimat, serta Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Sriatun Subandi menegaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, penanaman nilai moral dan etika harus dimulai sejak dini dari dalam keluarga.

“Anak yang baik kuncinya ada di keluarga. Dari keluargalah nilai moral dan etika ditanamkan sejak

dini,” ujarnya.

Ia menambahkan, derasnya arus perkembangan teknologi di era digital dan globalisasi menjadikan tantangan mendidik anak semakin kompleks. Oleh karena itu, orang tua, khususnya ibu, dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri.

Sriatun menekankan bahwa ibu memiliki peran strategis sebagai pendidik utama sekaligus teladan bagi anak-anaknya. Ia juga mengingatkan pentingnya literasi media sosial serta pengawasan penggunaan gawai agar orang tua tidak terlambat dalam mendampingi anak di ruang digital.

“Ibu harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media sosial,” tegasnya.

Berdasarkan hasil survei Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sriatun mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak justru paling banyak terjadi di lingkungan keluarga.

“Beberapa survei menunjukkan kekerasan dapat terjadi di sekolah,

tempat umum, maupun di rumah. Namun, yang paling banyak justru terjadi di rumah sendiri. Tidak ada jaminan keluarga mampu maupun tidak mampu terbebas dari kekerasan, termasuk kasus perundungan,” jelasnya.

Melalui kegiatan edukasi parenting ini, Sriatun berharap para perempuan dan ibu dapat menjadikannya sebagai ruang belajar bersama untuk terus memperbaiki pola asuh terhadap putra-putrinya.

“Di tahun 2026 ini, saya mengucapkan selamat mendidik putra-putri kita menjadi generasi yang religius, cerdas, dan berakhlakul karimah,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, kemandirian, empati, serta rasa percaya diri kepada anak sebagai bekal menghadapi masa depan.

“Mari kita perkuat ketahanan keluarga dengan menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual,” pungkasnya. ● loe

Lahan Tidur di Lapas Porong Mulai Ditanami Jagung

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Lahan tidur 25 tahun seluas hampir 6.000 meter persegi di Lapas Kelas I Surabaya atau Lapas Porong Sidoarjo, kini dibangun. Sarana asimilasi dan edukasi (SAE), lahan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menjadi media pembinaan kemandirian warga binaan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur (Kakanwil Ditjenpas Jatim) Kadiyono mengatakan, SAE Lapas Porong menjadi bukti nyata bahwa lembaga pemasyarakatan mampu berkontribusi langsung dalam menyukseskan program Presiden serta program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“SAE Lapas Porong dengan pembukaan lahan seluas 5.860 meter persegi. Lahan ini sudah cukup lama tidur dan kita bangkitkan untuk mendukung program ketahanan pangan,” ujar Kadiyono, Rabu (14/1).

Ia menjelaskan, seluruh insan pe-



Penanaman jagung di lahan tidur Lapas Porong.

masyarakatan yang memiliki lahan didorong untuk memaksimalkan potensi yang ada. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional agar lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga produktif.

Di Lapas Porong, program SAE diawali dengan penanaman jagung manis. Dengan bibit sekitar dua kilogram, lahan tersebut ditargetkan mampu

menghasilkan hingga 2,5 ton jagung dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Harapannya, dari lahan ini bisa menghasilkan sekitar 2,5 ton jagung. Ini bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga soal semangat pemasyarakatan untuk ikut mendukung program pemerintah,” tegasnya.

Kadiyono menambahkan, program SAE telah berjalan di sejumlah lapas

lain di Jawa Timur, seperti Lapas Kelas I Malang, Lapas Banyuwangi, Lamongan, Bojonegoro, Kediri, hingga Ngawi. Masing-masing lapas mengembangkan SAE sesuai dengan potensi daerah dan luas lahan yang dimiliki.

“Semangatnya sama, yaitu mensukseskan program Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. SAE ini adalah simulasi dan edukasi, melibatkan warga binaan yang sudah memenuhi syarat asimilasi,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan warga binaan dalam SAE bukan sekadar bekerja di lahan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mindset dan karakter. “Edukasi ini memberikan contoh bahwa dengan bekerja seseorang bisa menghasilkan. Ini akan membentuk perspektif dan citra yang baik, baik bagi warga binaan maupun pemasyarakatan,” katanya.

Ia berharap kolaborasi antara petugas dan warga binaan terus diperkuat. Menurutnya, dengan mengubah mindset, memberikan pelatihan yang baik, warga binaan dapat berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah. **(cat/rus)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Halte Baru Dilengkapi Ruang Tunggu Berkaca

Dukung Operasional Trans Jatim

SIDOARJO – Halte bus Alun-Alun Sidoarjo segera difungsikan bersamaan dengan dibukanya kembali kawasan alun-alun. Halte tersebut tetap melayani Trans Jatim dengan fasilitas yang kini lebih rapi dan nyaman. Beberapa fasilitas baru disiapkan seperti area tunggu yang beratap dan tertutup kaca, bangku

penumpang yang lebih nyaman, serta jalur naik-turun yang lebih tertata.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Dwi Jahjo Mardisunu memastikan tidak ada perubahan fungsi pada halte tersebut. Pembaruan hanya menysar sisi bangunan dan kelayakan layanan bagi penumpang. “Fungsinya masih sama dengan yang dulu,” katanya, Rabu (14/1).

Bangunan halte tersebut dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan (DLHK) Sidoarjo sebagai bagian dari penataan kawasan alun-alun. Pengoperasiannya menunggu pembukaan resmi alun-alun.

Dishub berharap fasilitas baru tersebut bisa mendukung pergerakan warga di pusat kota. Dengan halte yang lebih nyaman dan tertata, layanan transportasi umum di kawasan Alun-Alun diharapkan berjalan lebih optimal. (ful/hen)



Jawa Pos

Dikira Suara Biawak, Ternyata Tembok Retak

SIDOARJO – Januar, warga Desa Gelam, Candi, sempat mendengar bunyi krek-krek. Namun, dia mengira itu suara biawak. Januar baru tahu jika itu ternyata suara tembok rumahnya yang retak dan akhirnya rumah miliknya ambruk.

Ambruknya rumah Januar terjadi pada Selasa (13/1) malam sekitar pukul 22.00. Saat itu, Januar, istri, dan kedua anaknya sedang tidur di dalam rumah. Beruntung, mereka masih sempat menyelamatkan diri.

"Awalnya terdengar bunyi krek-krek dan saya kira biawak. Tiba-tiba dinding samping ambruk, lalu bagian atas ikut runtuh," kata Januar. Dia menjelaskan jika tidak ada hujan deras apalagi angin kencang saat kejadian.

Kades Gelam M. Muslich mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan asesmen kondisi rumah tersebut dan akan mengusulkan bantuan perbaikan ke Pemkab. "Kami coba cek dulu kondisinya," ujarnya. (eza/hen)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BUTUH PERHATIAN: Januar mengumpulkan sisa-sisa barang berharga di rumahnya yang ambruk Selasa (13/1) malam.



DOK. BPBD SIDOARJO

SEBABKAN MACET: Petugas BPBD Sidoarjo dan anggota Polsek Gedangan mengevakuasi pohon tumbang di Jalan Raya Gedangan kemarin (14/1).

Pohon Tumbang Tutup Jalan Raya Gedangan

SIDOARJO – Pohon sono setinggi tujuh meter tumbang dan menutup ruas Jalan Raya Gedangan arah Sidoarjo kemarin (14/1). Pohon tumbang gara-gara sebagian dahannya tersangkut truk trailer yang melintas. Gara-gara pohon menutup jalan, terjadi kemacetan di jalan menuju pusat kota.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengungkapkan bahwa kejadian pohon tumbang sekitar pukul 12.30. Setelah mendapat laporan, Tim BPBD Sidoarjo bersama anggota Polsek Gedangan turun tangan melakukan evakuasi pohon terse-

but. Dari hasil assesmen, diketahui pohon sudah doyong ke arah jalan. "Kelihatannya memang tersangkut bak truk," katanya.

Kapolsek Gedangan Kompol Anak Agung Gede Putra Wisnawa mengatakan bahwa tidak ada pengendara yang tertimpa pohon tersebut. Anggota langsung ke lokasi untuk pengalihan arus agar kendaraan lewat frontage road. Butuh waktu sekitar satu jam hingga akhirnya pohon bisa dievakuasi dari jalan. "Kami buka kembali jalan sejam setelah penanganan dan pembersihan di lokasi," ungkapnya. (eza/hen)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BAHAS ASUSILA: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori (kiri) memimpin rapat terkait kasus pelecehan seksual di Tulangan kemarin (14/1).

Setahun, 358 Anak Jadi Korban Kekerasan

SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) menyusul adanya kekerasan seksual terhadap anak SD di Desa Medalem, Kecamatan Tulangan. Selain membahas masalah tersebut, legislatif dan eksekutif juga membahas tingginya korban kekerasan di kalangan anak-anak.

Kekerasan terhadap anak di Sidoarjo cenderung meningkat. Pada 2024, tercatat ada 253 kasus kekerasan pada anak-anak. Jumlahnya naik menjadi 358 kasus

tahun lalu. “Meningkatnya karena korban dan keluarga saat ini sudah mulai berani speak up dan melapor,” kata Kepala DP3AKB Sidoarjo Heni Kristiani.

Dia menegaskan jika seluruh korban kasus tulangan sudah didampingi. Ada tiga balita dan dua remaja. Heni menambahkan, para korban merupakan kakak beradik yang menjadi sasaran sejak 2020. Anak-anak itu kerap diajak dan dibujuk pelaku sebelum mengalami kekerasan.

Satgas Pencegahan Belum Optimal

, Kabid Mutu Pendidikan Dispendikbud Sidoarjo Lisa

Kartika menyatakan setiap sekolah telah memiliki Satgas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Namun pelaksanaannya masih perlu dievaluasi karena belum berjalan optimal. “Kami bekerjasama dengan DP3AKB sudah melakukan sosialisasi secara rutin kepada guru, siswa dan orang tua,” jelasnya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menilai persoalan anak semakin kompleks. Karena tidak sedikit anak yang terpapar konten digital dewasa. Upaya perlindungan anak perlu diperkuat dengan melibatkan peran keluarga. **(ful/hen)**

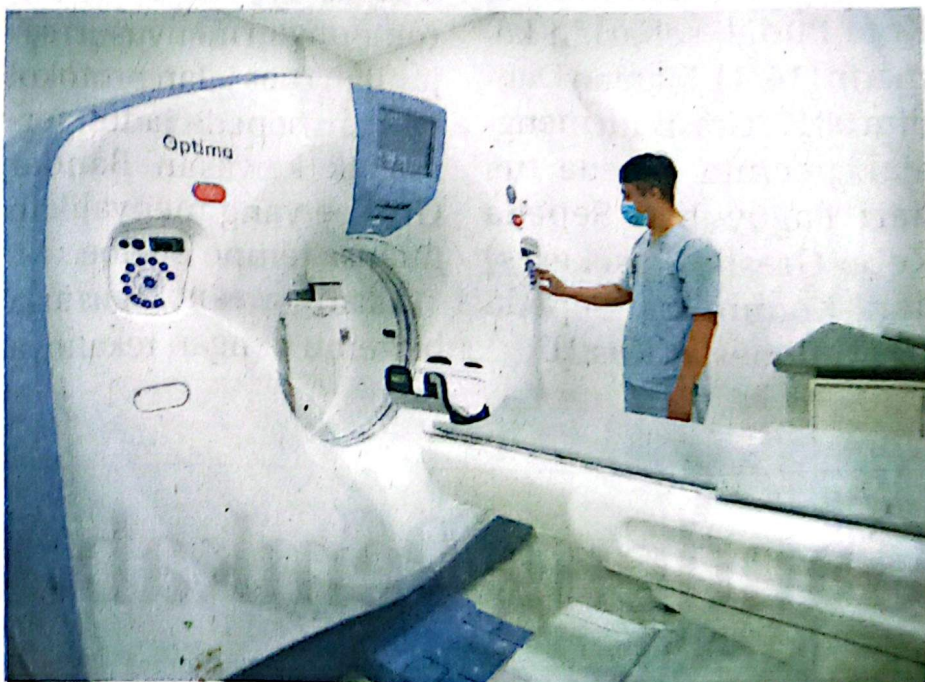
Jawa Pos

Berkapasitas 100 Tempat Tidur, RS Mitra Keluarga Pagerwojo Sasar Warga Perkotaan

SIDOARJO – Jumlah rumah sakit (RS) di Kota Delta kian bertambah. RS Mitra Keluarga Pagerwojo resmi mulai beroperasi sebagai rumah sakit swasta baru di wilayah pusat kota.

Humas RS Mitra Keluarga Pagerwojo Ruben Liandoro mengatakan rumah sakit itu mengusung layanan unggulan ibu dan anak, orthopaedi center, serta pengembangan layanan onkologi. Fokus layanan tersebut berbeda dengan cabang Mitra Keluarga Waru yang lebih menonjolkan layanan jantung dan pencernaan. “Kami ingin menjangkau masyarakat Sidoarjo bagian selatan agar tidak perlu jauh-jauh ke arah Waru,” katanya, kemarin (14/1).

Saat ini layanan rawat jalan, rawat inap dan poli spesialis sudah berjalan. Untuk layanan MRI yang akan segera diope-
rasikan. “Rumah sakit kami memiliki kapasitas 100 tempat



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BARU: RS Mitra Keluarga Pagerwojo membuka layanan CT scan untuk masyarakat.

tidur,” kata Ruben. Dia berharap kehadiran RS Mitra Keluarga Pagerwojo dapat menjadi pilihan baru layanan kesehatan bagi warga Sidoarjo dan sekitarnya.

Sebaran Belum Merata

Mengacu data dinkes, saat ini sudah ada 32 RS di Kota Delta. Angkanya dianggap cukup. Meski, persebarannya

belum merata.

Ada tiga kecamatan yang belum memiliki RS. Yakni Kecamatan Jabon, Tanggulangin, dan Buduran. Dinkes Sidoarjo menilai kebutuhan layanan di wilayah tersebut masih bisa ditopang oleh faskes terdekat. Seperti Jabon dan Tanggulangin ada RS Bhayangkara Pusdik di Porong. (ful/hen)

Jawa Pos



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mengecek kondisi SDN Jaticalang. ✓

Kondisi Gedung SDN Jaticalang Bahayakan Siswa

Wabup Mimik Instruksikan KBM Dipindah

Sidoarjo, Memorandum

Kekhawatiran warga dan civitas SDN Jaticalang akan kondisi gedung yang sudah termakan usia, langsung direspons Wabup Sidoarjo Mimik Idayana. Wabup perempuan pertama di Kota Delta itu bahkan instruksikan kegiatan belajar mengajar (KBM) dipindah ke tempat yang lebih aman.

Instruksi itu dikeluarkan wabup usai sidak ke sekolah yang terletak di Desa Jaticalang, Kecamatan Prambon pada Selasa 9/13/1). Ia melihat langsung kondisi bangunan sekolah yang memang sudah tidak layak.

Sejumlah kerusakan yang berpotensi membahayakan keselamatan siswa ditemui. Mulai dari rangka atap yang lapuk, kusen jendela rapuh, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya sehingga butuh perawatan menyeluruh. "Kami tidak ingin menunggu sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Anak-anak harus belajar di tempat yang aman. Keselamatan siswa adalah prioritas utama," tegas Mimik Idayana.

Kepala SDN Jaticalang Andriyanto ketika mendampingi sidak, menyebutkan kondisi bangunan memang membahayakan siswa jika tidak segera ditangani. "Saya takut terjadi sesuatu pada anak-anak. Alhamdulillah, respons ibu wakil bupati sangat cepat. Hari Jumat saya sampaikan, Selasa beliau sudah datang langsung melihat kondisi sekolah," tutur Andriyanto.

Anggota DPRD Sidoarjo Ning Irda yang mendampingi sidak wabup, siap berkoordinasi dan membagi peran agar perbaikan segera direalisasikan. "Kita berbagi tugas. Paving akses jalan masuk sekolah akan menjadi perhatian dewan. Sedangkan perbaikan tembok dan paving halaman belakang untuk area parkir siswa akan saya upayakan agar sepeda siswa aman dari banjir dan pencurian," jelas Mimik Idayana.

Kepala Desa (Kades) Jaticalang Budi Utomo menyampaikan, sekolah tersebut belum pernah mendapatkan revitalisasi besar selama puluhan tahun. Kondisinya lebih banyak ditopang oleh perbaikan kecil yang bersifat sementara. "Saya alumni sekolah ini. Sejak dulu bangunannya hampir sama, belum pernah ada perbaikan menyeluruh," ujarnya. (sud/kri/san/epe)



PEMBANGUNAN KDMP: Lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. BM/ST

Dinkop Pastikan Pembangunan KDMP Sidorejo Sesuai Prosedur

SIDOARJO (BM) - Dinas Koperasi (Dinkop) Kabupaten Sidoarjo memastikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tidak melanggar prosedur pembangunan.

Kepala Dinkop Sidoarjo Edi Kurniadi menegaskan bahwa adanya penolakan sebagian warga terhadap pembangunan tersebut merupakan kesalahpahaman warga sekitar serta kurangnya komunikasi pihak-pihak terkait atas pembangunan KDMP tersebut.

"Ada sekelompok masyarakat setempat yang kurang paham terhadap mekanisme penentuan dan prosedur pembangunan KDMP Sidorejo," kata Edi di Sidoarjo, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penetapan lokasi tersebut diambil setelah terjalannya koordinasi antara pihak Komando Rayon Militer

(Koramil), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta dinas terkait yang telah dibahas melalui mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa yakni Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Edi sekaligus menegaskan bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan tersebut bukan merupakan tanah untuk fasilitas umum (fasum), melainkan tanah desa yang diperuntukkan untuk berbagai pemanfaatan seperti lapangan voli hingga fasilitas rumah hijau warga.

Ia turut memastikan bahwa tanah tersebut sesuai dengan aturan terkait pembangunan KDMP. "Bukan tanah untuk fasum, namun tanah aset desa yang siap bangun. Bukan lahan sawah, bukan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B), dan bukan lahan sawah dilindungi (LSD) sesuai aturan pembangunan KDMP," kata Edi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan KDMP Sidorejo tersebut akan terus berjalan sesuai prosedur, sembari pihaknya akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pemanaku kepentingan terkait, untuk terus mengedukasi warga terkait pembangunan KDMP Sidorejo.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, melakukan penolakan terhadap pembangunan KDMP desa tersebut dengan menutup akses masuk pembangunan menggunakan spanduk yang bertuliskan penolakan warga, sejak Jumat (9/1).

Warga menilai pembangunan KDMP tersebut tidak melibatkan aspirasi warga sekitar. Warga juga menilai pembangunan tersebut dilakukan di atas tanah fasum yang biasa digunakan warga untuk berbagai kegiatan. (udi)

✓ Adanya Bangunan Permanen Membuka Peluang Ditindaklanjuti Kejari

Aset Pemkab di Kecamatan Taman

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Kasus dugaan penyalagunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kelurahan Taman dan perkara korupsi Rusunawa Desa Tambaksawah Kecamatan Waru menunjukkan pola yang nyaris serupa. Aset Negara dimanfaatkan di luar mekanisme resmi berlangsung puluhan tahun dan baru tersentuh aparat penegak hukum setelah persoalan mencuat. Persoalan ini membuka kembali perdebatan lama soal lemahnya pengawasan negara terhadap kekayaanannya sendiri.

Perbedaannya, satu perkara telah berujung penetapan tersangka dan penahanan, sementara yang lain masih berada di tahap pemeriksaan awal tanpa kejelasan arah hukum.

Di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo tengah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemanfaatan Tanah Kas Desa yang diduga berlangsung tanpa izin selama belasan tahun. Di atas lahan tersebut berdiri 56 bangunan permanen berupa rumah warga.

Kepala Seksi Intelijen

Kejari Sidoarjo, Hadi Sucipto, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap camat dan perangkat wilayah setempat. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami tindak lanjut rekomendasi BPK yang menyoroti lemahnya pengawasan dan tata kelola aset negara/daerah.

"Iya sempat diperiksa. Saya belum dapat info jelasnya dari pidana khusus," kata Hadi saat dikonfirmasi beberapa pekan lalu.

Salah satu titik krusial yang masih ditelusuri adalah siapa pihak yang menerima manfaat ekonomi dari pemanfaatan TKD tersebut, jika memang ada. Ketidakjelasan aliran retribusi atau pungutan inilah yang membuat perkara masih berada di wilayah abu-abu antara pelanggaran administratif dan pidana korupsi.

Berbeda dengan TKD Taman, Kejari Sidoarjo justru bertindak tegas dalam perkara pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru. Tepat pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Kejari menetapkan empat tersangka, termasuk Kepala Desa Tambaksawah, Imam Fauzi.

Dalam perkara ini, Kejari

menemukan bahwa pengelolaan rusunawa, aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak swasta sejak 2008 hingga 2022. Pendapatan sewa yang seharusnya masuk ke kas daerah justru dikelola di luar mekanisme resmi, menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 9,7 miliar.

Pengelolaan yang diterapkan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Kajari Sidoarjo, Roy Rov-alino Herudiansyah pada saat itu.

Dalam kasus Rusunawa, unsur pidana korupsi dinilai lengkap: ada perbuatan melawan hukum, ada pihak yang diuntungkan, dan kerugian negara dapat dihitung secara nyata: Pola Serupa, Titik Perbedaan di Manfaat Ekonomi

Jika ditarik benang merah, kedua perkara ini memiliki persamaan mencolok. Sama-sama menyangkut aset negara/daerah, dimanfaatkan di luar mekanisme resmi, berlangsung lama, dan terjadi dalam konteks lemahnya pengawasan aparat wilayah.

Pengamat hukum Ahmad Fauzi menilai pemeriksaan terhadap camat dalam kasus



TKD Taman merupakan langkah wajar. "Jabatan pembina wilayah memiliki tanggung jawab pengawasan. Pendirian bangunan permanen di atas aset pemerintah tidak bisa dilepaskan dari peran pengawasan itu," ujarnya.

Namun, menurut Fauzi, perbedaan penanganan antara TKD Taman dan Rusunawa Tambaksawah terletak pada satu aspek kunci: pembuktian manfaat ekonomi dan kerugian negara.

Begitu ada bukti pihak tertentu menikmati manfaat dari aset negara, konstruksi hukumnya akan bergerak ke tindak pidana korupsi," katanya.

Namun bagi publik, perbandingan dua perkara ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah negara akan konsisten menegakkan hukum atas pengelolaan asetnya sendiri, ataukah ketegasan hanya muncul ketika kerugian negara sudah terhitung jelas?

Kasus Rusunawa Tambaksawah telah menjadi preseden. Sementara TKD Taman kini berada di persimpangan: berhenti sebagai pelanggaran administratif, atau berkembang menjadi perkara pidana jika penyelidikan menemukan siapa yang diuntungkan dari pemanfaatan aset negara tersebut. (Lie/Khol)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dikerjakan Secara Bertahap, Pembangunan Pujasera Desa Ganting Mencapai Progres 90%

Sidoarjo, Pojok Kiri,

Pengelolaan aset Desa, Desa Ganting Kecamatan Gedangan yang dimanfaatkan untuk pujasera merupakan cara efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan ekonomi lokal seperti kerjasama pemanfaatan (KSP), sewa, atau dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Konsep pujasera yang dibangun oleh pemerintah Desa ganting tersebut nantinya akan memberikan

kenyamanan bagi para pengunjung, pasalnya bangunan yang berdiri di atas tanah kas Desa Tersebut sesuai dengan tata ruang yang sudah di rencanakan di lengkapi dengan berbagai Sarana Dan Prasarana Diantara Ruang terbuka Hijau, pagar, kamar mandi dan toilet, Musholla serta halaman parkir yang luas dengan perkerasan menggunakan Material Paving Block.

Dalam keterangannya kepala Desa Ganting Anu-

war Rokib, S.H, menjelaskan, pembangunan Pujasera yang berdiri di tanah kas Desa Tersebut memang sudah menjadi program kerja kami yang dituangkan dalam Rencana

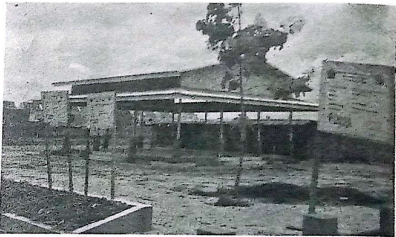
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk kebutuhan 8 (Delapan) tahun kedepan yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat melalui proses

perencanaan partisipatif, serta menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan.

"Dalam pembanguann Pujasera Tersebut memang kita lakukan secara bertahap karena menyesuaikan anggaran, jadi pembangunannya kita lakukan secara periodik atau per segmen, karena selain kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pujasera kita juga mengalokasikan ang-

garan dari APBDes untuk pembangunan sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan seperti mengutamakan perbaikan atau pembangunan yang paling mendesak yang dibutuhkan warga, misalnya jalan rusak, saluran air, atau fasilitas dasar lainnya," tambahnya.

"Alhamdulillah saat ini pembangunan Pujasera sesuai dengan dengan rencana kita buat sudah mencapai progres 90% dan tinggal perapihannya saja, sesuai den-



gan pengelolaan aset dan waktu sewa sesuai dengan berlaku nantinya aset Desa berupa Pujasera tersebut penggunaanya dapat berupa Sewa, pinjam pakai ataupun

yang lainnya dengan Jangka hasil musyawarah yang kita lakukan bersama Lembaga Desa dan Juga masyarakat," pungkasnya. (Nang)

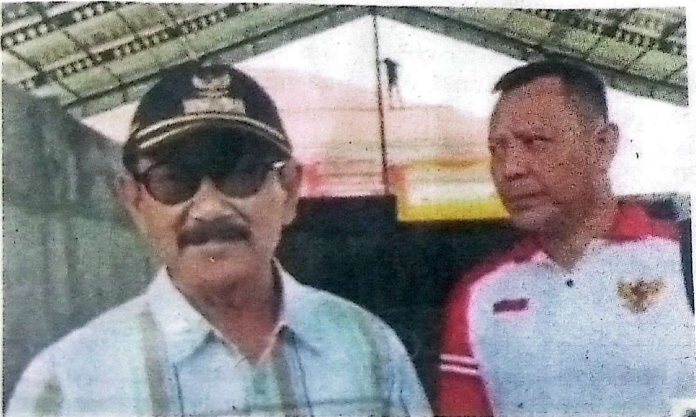
POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Pembangunan Koperasi Merah Putih di Rangkah Kidul Capai 70 Persen, Ditarget Rampung Akhir Januari 2026

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pembangunan Koperasi Merah Putih di lahan desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo Kota, terus menunjukkan progres positif. Mulai dikerjakan akhir november 2025, proyek ini telah mencapai sekitar tujuh puluh persen dan ditargetkan selesai seratus persen pada akhir Januari mendatang.

Koperasi ini digagas sebagai pusat ekonomi desa yang diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat serta membuka ruang partisipasi dalam kegiatan usaha produktif. Pemerintah desa menilai



pembangunan koperasi menjadi langkah strategis agar perputaran ekonomi desa tidak selalu bergantung pada sektor eksternal.

Kepala Desa Rangkah Kidul, Warlheyono, menjelaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih bukan hanya sekadar fasilitas

fisik, melainkan bagian dari upaya serius desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Menurutnya, pembangunan ini juga merupakan respons terhadap kebutuhan warga atas wadah ekonomi yang lebih terstruktur, transparan, dan bermanfaat jangka panjang.

Dalam penjelasannya Warlheyono mengatakan bahwa pihak desa telah menyiapkan seribu meter persegi lahan untuk pembangunan tersebut.

● Bersambung Hal. 1

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Pembangunan Koperasi Merah Putih di Rangkah Kidul Capai 70 Persen, Ditarget Rampung Akhir Januari 2026

● Sambungan Hal 1

Ia menegaskan bahwa komposisi lahan juga direncanakan secara matang agar fasilitas koperasi dapat berfungsi secara optimal.

“Seribu meter lahan sudah kami siapkan untuk pembangunan koperasi. Dari total itu, sekitar enam ratus meter akan digunakan untuk bangunan gedung, sedangkan empat ratus meter sisanya disiapkan sebagai area parkir,” ujar Warlheiyo, pada Rabu (14/01).

Meski pembangunannya telah mencapai progres signifikan, proses ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Beberapa warga sempat menyampaikan keberatan mengenai pemanfaatan lahan, terutama terkait penentuan lokasi.

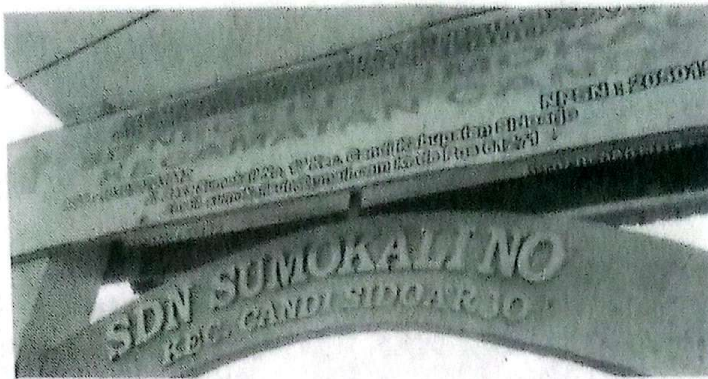
Namun penolakan tersebut dapat diredam melalui musyawarah dan dialog terbuka dengan melibatkan berbagai unsur lingkungan desa mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan warga yang terdampak. Pemerintah desa menilai langkah ini

menjadi kunci agar pembangunan berjalan dengan aman dan tetap berpijak pada asas partisipatif.

Melihat progres pekerjaan yang telah mencapai tujuh puluh persen, pemerintah desa optimistis pembangunan Koperasi Merah Putih dapat dituntaskan tepat waktu pada akhir Januari 2026. Setelah beroperasi, koperasi ini diharapkan memberi dampak nyata bagi warga, terutama dalam hal penyediaan ruang usaha, distribusi barang kebutuhan, maupun penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Pemerintah desa juga membuka ruang diskusi bagi warga agar pengelolaan koperasi dapat berjalan transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga bagian dari sistem usaha desa.

Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam perjalanan kemandirian ekonomi desa Rangkah Kidul dan dapat menjadi model bagi desa lain di wilayah Sidoarjo. (Sul)



Dugaan Pungli Dana PIP di SDN Sumokali Mencuat, Kepala Sekolah Tolak Dikonfirmasi

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Sumokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo mencuat ke publik. Saat awak media mendatangi sekolah tersebut untuk melakukan konfirmasi, Kepala Sekolah SDN Sumokali, Khoiriyah, diduga sengaja menghindar dan enggan memberikan klarifikasi.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi (14/01). Kedatangan awak media ke sekolah tersebut bertujuan meminta penjelasan terkait informasi pemotongan dana PIP yang diterima siswa. Namun, alih-alih mendapat klarifikasi, awak media justru mengaku mendapat perlakuan tidak pantas dari oknum guru.

"Kami datang dengan itikad baik, masuk ruang guru juga permisi secara sopan dan hanya menanyakan keberadaan kepala sekolah. Tapi respons salah satu oknum guru perempuan justru sinis dan terkesan merendahkan. Kami tidak mencari masalah, tapi perlakuannya seperti tidak beretika," ujar jurnalis yang berada di lokasi.

Upaya konfirmasi pun gagal lantaran Kepala Sekolah tidak berada di tempat dan tidak ada kejelasan kapan bersedia ditemui. Sikap tertutup tersebut memunculkan dugaan kuat adanya upaya menghindari pertanggungjawaban atas isu yang tengah mencuat.

Berdasarkan data yang dikantongi awak media, setiap siswa penerima PIP di SDN Sumokali diduga dipotong sebesar Rp75 ribu dengan dalih untuk pembangunan sekolah. Jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Terpisah, Ketua LSM Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, menegaskan bahwa segala bentuk pungutan liar di lingkungan sekolah negeri tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Sekolah negeri sudah dicover oleh dana BOS pusat dan BOS daerah. Kalau masih ada pungutan, apalagi dari dana bantuan untuk siswa kurang mampu seperti PIP, itu patut diduga sebagai bentuk penyelewengan," tegas Sigit saat ditemui di kantornya. (Nang)



✓ **Proyek Plensengan Gambir Anom Gedangan Anggaran APBD 2025 Diduga Tabrak Regulasi Kental Korupsi**

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Banyaknya proyek yang dibiayai APBD Sidoarjo banyak permasalahan baik itu pekerjaan yang dilakukan secara lelang maupun pekerjaan secara penunjukan langsung (PL).

Pekerjaan fisik yang masih banyak yang belum selesai hingga awal tahun 2026 ini, baik pekerjaan lelang maupun pekerjaan penunjukan langsung, ini sesuai fakta dilapangan yang telah disurvei langsung oleh wartawan pojok kiri. Sedangkan yang paling menarik dan tidak banyak orang tahu, bahwa ada pekerjaan anggaran APBD tahun 2025, belum tanda tangan kontrak, pekerjaan sudah ada yg menjadi 70% hasil pekerjaannya. Permainan ini diduga ada konspirasi/kongkalikong antara kontraktor degan oknum dinas terkait untuk meraup uang haram ini, ucap salah satu pegiat sosial DH pada wartawan, Rabu, 14/1/26. Sedang yang jadi pertanyaan apakah hal seperti ini diperbolehkan dalam aturan dari kementerian pekerjaan umum atau peraturan daerah atau bupati selaku kepala daerah?

Wartawan pojok kiri mempertanyakan hal ini kepada seorang kontraktor berinisial MH yang tidak mau disebut nama lengkap, bahwa apa bila ada pekerjaan dari anggaran pemerintah jika itu pekerjaan pembangunan, itu tidak diperbolehkan. Dari mana dia tahu bahwa pekerjaan itu dikerjakan olehnya kalau kontrak kerjanya belum ditanda tangani? Berarti disini ada permainan antara kontraktor degan oknum pihak dinas.

Dalam pekerjaan anggaran tahun 2025, ada beberapa titik pekerjaan yang ditemui wartawan pojok kiri yang melakukan pekerjaan namun belum ada tanda tangan kontrak yang diduga dikerjakan CV Bhavana Dwi Putra dengan proyek plensengan di Gambir Anom Gedangan yang kini masih belum selesai masih kisaran 40 persen. (Tim/Bersambung)